

# Strategi Implementasi Kebijakan Publik dalam Mendorong Percepatan Pengembangan Pengguna Internet

## *Public Policy Implementation Strategy in Encouraging Acceleration of Internet Users Development*

Tatiek Mariyati

*Puslitbang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika  
Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110*

tatiek\_mar@yahoo.com

Naskah diterima: 1 Maret 2013; Direvisi: 17 April 2013; Disetujui: 22 Mei 2013

**Abstract**— Internet has brought the people of the world to a global village concept, so people can connect with each other without any limitation of space and time. The government is still trying to increase the number of Internet users, because the number of internet users in the country is still very low. Increased economic growth can take place between them as a result of the rapid growth of the Internet. It is therefore necessary performance Communications and Information Agency in the provincial government to develop programs and internet development revamping the organizational structure in order to achieve a 50 % performance achievements penetration of the population in 2015. The government should also conduct training that impact on the rapid development of the Internet is prepared according to the will of the people who use the internet, especially on the availability of infrastructure and operational devices. Through public policy implementation strategy is expected to drive the level of internet usage more. Therefore the task of the government to formulate public policy implementation strategy that is expected to affect the development of the internet needs to be realized with as much as you. The methodology used in descriptive research approach and to use the analysis of public policy. Internet development is ultimately expected to support the improvement of public welfare. The results showed that the public policy implementation strategy is very effective in increasing the number of Internet users in a bid to build the economic welfare of society.

**Keywords**— implementation, public policy, internet users

**Abstrak**—internet telah membawa masyarakat dunia kepada sebuah konsep *global village*, manusia dapat terkoneksi satu dengan lainnya tanpa ada batasan ruang dan waktu. Pemerintah masih berupaya untuk meningkatkan jumlah pengguna internet, karena jumlah pengguna internet di negeri ini masih sangat

rendah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat terjadi diantaranya sebagai akibat semakin pesatnya pertumbuhan internet. Oleh karena itu diperlukan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika di pemerintahan provinsi untuk menyusun program pengembangan internet dan pembenahan struktur organisasi agar capaian kinerja mencapai 50% penetrasi dari populasi penduduk pada tahun 2015. Pemerintah perlu pula melakukan pembinaan yang berdampak pada semakin cepatnya pembangunan internet yang disiapkan sesuai kehendak masyarakat pengguna internet, terutama pada ketersediaan infrastruktur maupun perangkat operasionalnya. Melalui strategi implementasi kebijakan publik diharapkan dapat mendorong tingkat penggunaan internet yang lebih banyak lagi. Karenanya tugas pemerintah untuk menyusun strategi implementasi kebijakan publik yang diharapkan dapat berpengaruh kepada pengembangan internet ini perlu direalisasikan dengan sebaik baiknya. Metodologi yang digunakan dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dan dengan menggunakan analisis kebijakan publik. Pengembangan internet pada akhirnya diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi implementasi kebijakan publik sangat efektif dalam meningkatkan jumlah pengguna internet dalam upaya membangun kesejahteraan ekonomi masyarakat.

**Kata kunci**— implementasi, kebijakan publik, internet, pengguna internet

### I. PENDAHULUAN

Sebagaimana masyarakat sudah banyak yang mengetahui bahwa pertemuan *World Summit of Information Society* (WSIS) di Geneva pada bulan Desember 2003 yang juga

dihadiri Indonesia, dalam deklarasi prinsip dan rencana aksinya para pemimpin bangsa bangsa sepakat mengatasi kesenjangan digital ini dengan menaruh target bersama bahwa pada tahun 2015, 50% penduduk suatu Negara telah terhubung dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Suhrowardi, 2006).

Penggunaan internet di Indonesia saat ini telah menunjukkan perkembangannya yang cukup pesat dan membawa dampak kemajuan berarti utamanya bagi masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, strategi implementasi kebijakan publik dipandang penting untuk lebih memperkokoh percepatan peningkatan jumlah pengguna internet dengan mengingat visi Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional adalah “ASEAN Leading Nation 2019” dengan basis TIK (Abdulaziz).

Pergeseran gaya kehidupan konvensional masyarakat perdesaan yang mulai tersentuh *Universal Service Obligation/USO*, sangat diharapkan dapat memberi pengaruh kuat pada kehidupan masyarakat yang lebih mengenal TIK, penguatan kelembagaan dan ekonomi masyarakat desa dengan penggunaan teknologi tepat guna dalam pembangunan prasarana dan sarana perdesaan (Mariyati, 2009)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghantarkan masyarakat dunia pada sebuah perubahan dan membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan. Demikian juga perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pada saat ini telah mengarah kepada berbagai perkembangan, diantaranya penggunaan Internet. Internet merupakan suatu jaringan komunikasi tanpa batas yang melibatkan jutaan komputer pribadi yang tersebar di seluruh dunia. Dengan menggunakan protokol : *Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)* dan didukung oleh media komunikasi seperti satelit dan paket radio, internet telah memungkinkan komunikasi antar komputer dengan jarak yang tidak terbatas (Oetomo, 2002).

Internet sebagai sebuah kemajuan teknologi dan informasi telah memberikan masyarakat sebuah layanan data dan komunikasi dengan kecepatan tingkat tinggi. McLuhan juga menyebutkan bahwa internet akan membawa masyarakat dunia kepada sebuah konsep *global village* dimana antar manusia dapat terkoneksi satu dengan lainnya tanpa adanya batasan apapun. Internet telah memberikan kemajuan dalam bidang komunikasi dimana teks, audio dan visual dapat diakses secara bersamaan dan simultan. Mekanisme ini juga telah membawa dampak signifikan terhadap perubahan aktivitas industri komunikasi.

Perkembangan teknologi yang menuju era komputer, kini telah menjadi salah satu komponen penting dalam kehidupan manusia. Komputer sudah merupakan sebuah *hardware* hasil dari teknologi komunikasi.

Aspek aspek tersebut menempatkan komputer (dengan jaringan) sebagai sebuah produk dari adanya teknologi komunikasi. Teknologi informasi menunjukkan adanya kemajuan tentang bagaimana sebuah informasi diproses, diolah dan disebarkan secara luas dan cepat.

Teknologi komunikasi sebagai alat yang menambah kemampuan orang berkomunikasi dan teknologi informasi adalah pengerjaan data oleh komputer dan telekomunikasi. Sistem pengolahan data dan penyebaran informasi yang terus berkembang pesat saat ini menjadikan internet sebagai sebuah

sistem informasi (merangkap telekomunikasi) yang paling mutakhir dan paling populer dari semua sistem dan jaringan yang ada saat ini. Internet merupakan hasil dari perkembangan teknologi dan keberadaan komputer (Maryati, 2008).

Konvergensi media telah berpengaruh pada kemunculan media interaktif, seperti internet dan *new media* lainnya. Konvergensi media tidak lepas dari media interaktif yang menghubungkan sebuah sistem komunikasi antar perorangan maupun antara manusia dengan komputer (media) itu sendiri. Wireless juga telah berkembang pesat dengan makin berkembangnya alat canggih iPhone maupun iPad, sehingga informasi pun mudah di dapat.

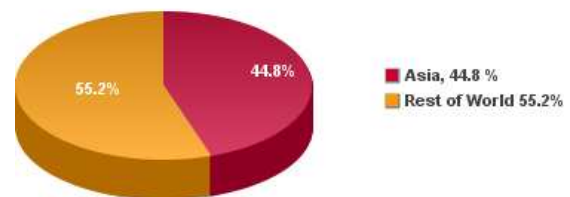
Perkembangan yang terjadi adalah akses Internet yang sudah tersebar di mana-mana, lebih cepat, dan semakin mudah diakses oleh masyarakat luas, beberapa situs jejaring sosial saling beradu eksistensinya (Maryati, 2008).

Internet telah memungkinkan orang berkomunikasi dan berbagi minat di dunia maya, seperti dengan berkembangnya situs Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, dan situs situs lainnya yang membuat seseorang semakin fokus berjelajah di dunia maya.

*International networking* atau internet merupakan jejaring global yang menghubungkan suatu komputer dengan setiap komputer di seluruh dunia. Perkembangan internet bukan hanya pada perangkat komputer yang bisa disambungkan, tetapi juga perangkat mobile. Maka internet kini bisa ada dimana-mana. Keberadaan media internet yang dapat dioperasikan secara global telah menghilangkan rintangan ruang dan waktu, sehingga kemudahan ini menjadikan masyarakat dapat menjangkau pengguna internet dimanapun berada.

Menghadapi hal demikian, maka negara berkembang menetapkan kebijakan agar industri besar dan industri kecil dapat memiliki kemampuan bersaing di pasar global. Globalisasi pada dasarnya disebabkan antara lain disebabkan faktor peningkatan dan modernisasi saluran telekomunikasi global melalui serat-serat optic (*fiber optics*), satelit dan teknologi komputer, perdagangan bebas antar negara, investasi modal asing dan lain lain (Maryati, 2009).

Data pengguna internet di Indonesia yang tercatat pada bulan Juni 2012 telah mencapai 62,9 juta, yang berarti hanya ada sedikit kenaikan dibanding pada akhir tahun 2011 yang mencatat jumlah pengakses internet sebesar 55 juta (Bisnis Indonesia, 2012). Data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan internet di Indonesia pada tahun 2012 mencapai 22.4% dibanding dengan populasinya. Target yang ingin dicapai Indonesia pada 2015 adalah penetrasi internet di Indonesia mencapai 50% dari total penduduk. Artinya masih harus meningkat 27.6% lagi untuk menuju target 2015.



Source: [www.internetworldstats.com/stats3.htm](http://www.internetworldstats.com/stats3.htm)  
 1,076,681,059 Internet users in Asia estimated for June 30, 2012  
 Copyright © 2012, Miniwatts Marketing Group

Gambar 1 Pengguna internet di Asia.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Kewajiban Pelayanan Universal / Universal Service Obligation (KPU/USO) adalah kewajiban yang dibebankan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk berkontribusi menyediakan aksesibilitas di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh jaringan telekomunikasi. Aksesibilitas di atas disediakan oleh penyelenggara jaringan tetap local dan terintegrasi ke sentral local penyelenggaraan yang bersangkutan (Puslitbang SDPPI 2012).

Untuk membangun infrastruktur internet, pemerintah sudah mengembangkan dengan menggunakan dana dari kewajiban pelayanan universal (*Universal Service Obligation-USO*) melalui berbagai program, diantaranya program desa berdering (langkah awal), Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK), mobile PLIK, dan Indonesia Internet Exchange. Data penggunaan internet dibanding dengan penetrasi terhadap populasi di Asia Tenggara per 31 Desember 2011 yang disampaikan oleh Internet World Stats sebagai berikut :

TABEL 1 PENGGUNA INTERNET DIBANDING PENETRASI TERHADAP POPULASI

No.	Negara	Jumlah penggunaan Internet (Juta)	Penetrasi terhadap Populasi (%)
1	Brunei Darussalam	318,900	79,40
2	Indonesia	55	22,40
3	Malaysia	17,72	61,70
4	Singapura	3,66	77,20
5	Thailand	18,31	27,40
6	Vietnam	30,52	33,70

Sumber : *Internet World Stats, 2011*

Memasuki era konvergensi teknologi saat ini, teknologi informasi dan komunikasi –TIK dipandang penting dalam menyelenggarakan dengan optimal peran informasi dan komunikasi. Kesadaran memandang penting ini mengingatkan bahwa dengan perkembangan teknologi, peran komunikasi publik akan semakin dominan dalam usaha mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat terutama pada masyarakat di wilayah tertinggal di bidang teknologi informasi, dalam orientasi membentuk opini publik, dan menjalankan fungsi-fungsi demokrasi dalam bernegara (Mariyati, Tatiek, 2009). Membahas tentang Strategi Implementasi Kebijakan Publik Dalam Mendorong Percepatan Pengembangan Pengguna Internet, maka ada beberapa aspek yang mendukung keberhasilannya, yaitu :

1. Peran pemerintah dalam membangun layanan jasa internet;
2. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah bidang komunikasi dan informatika;
3. Program-program pengembangan internet, kemajuan dan kendala.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Strategi Implementasi Kebijakan Publik Dalam Mendorong Percepatan Pengembangan Pengguna Internet akan sangat berpengaruh pada perkembangan kapasitas layanan internet;

2. Tantangan ke depan bahwa semakin meningkatnya jumlah pengguna internet, diharapkan dapat mencapai prestasi alam bentuk nilai prosentase penetrasi terhadap populasi;

Berdasarkan perumusan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bermaksud untuk dapat menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apakah dalam pengembangan internet diperlukan strategi implementasi kebijakan publik sehingga berpotensi percepatan dalam meningkatkan pengguna internet ?
2. Bagaimana penerapan Strategi Implementasi Kebijakan Publik Dalam Mendorong Percepatan Pengembangan Pengguna Internet?

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai Strategi implementasi kebijakan publik dalam mendorong percepatan pengembangan pengguna internet sehingga menunjang meningkatnya pengguna internet dan perkembangannya, meliputi :

1. tingkat manfaat penggunaan internet;
  2. tingkat kesesuaian antara kinerja implementasi kebijakan publik yang dirasakan dengan yang diharapkan oleh pengguna internet;
  3. membangun efektivitas kinerja dinas kominformasi di daerah;
- Dan saran penelitian adalah :
1. Peningkatan pengguna internet yang mencapai tingkat kesesuaian atas keberdayaan implementasi kebijakan publik yang dirasakan.
  2. Pembangunan layanan internet yang berkelanjutan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna internet, pemerintah terus fokus memperluas akses internet. Diantaranya dengan pembangunan jaringan kabel serat optik.

Dalam perkembangannya, tuntutan masyarakat di kota besar sangat membutuhkan akses internet yang lebih cepat. Hasil penelitian kuartal II "2012 State of the Internet" dari Akamai menunjukkan bahwa di Indonesia cukup banyak pengguna yang *browsing* dengan kecepatan internet sangat lambat. Hanya sekitar 13,8 persen pengguna internet di Indonesia yang mendapat koneksi internet dengan kecepatan maksimal atau di bawah 256 kbps, sedikit di atas standar GSM EDGE (*up to* 237 kbps).

Jumlah pengguna di Indonesia yang dapat menikmati akses internet *broadband* kecepatan tinggi ternyata jumlahnya sangat sedikit, hanya 0,82 persen dari total pengakses/pengguna internet Indonesia yang dapat menikmati koneksi dengan kecepatan di atas 4 Mbps.

Akamai mendefinisikan "*broadband*" sebagai koneksi berkecepatan 4 Mbps atau lebih. Di atasnya ada kategori "*high broadband*" dengan kecepatan 10 Mbps atau lebih. Jumlah pengguna di Indonesia yang bisa menikmati kecepatan setinggi itu hanya 0,1 persen.

Jepang adalah pasar yang terbesar di Asia (dan nomor dua terbesar di dunia) dalam jumlah orang terhubung dengan internet dan tingkat aplikasi *e-commerce*. Akan tetapi penetrasi internet di Jepang belum merata, ada kesenjangan antar tingkat pendidikan dan pegawai perusahaan kecil, dan sejumlah penduduk di pelosok belum memiliki akses internet. Singapura memiliki penetrasi internet tertinggi di Asia, dan pemerintahnya merupakan salah satu yang proaktif dalam

mempromosikan pemakaian internet dalam membangun masyarakat informasi. Singapura merupakan Negara pertama di dunia yang memiliki jaringan broadband nasional SingaporeOne (Ustadiyanto, 2002).

**Kebijakan Publik**

Pemerintah dalam hal kebijakan publik adalah pemegang kekuasaan yang dituntut untuk mengembangkan system pemerintahan yang demokratis. Karenanya, dalam menjalankan system pemerintahan ini harus ditopang dengan tata kelembagaan yang memungkinkan terwujudnya jalinan harmoni antara kehendak masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Demokratis dimaksudkan apabila kebijakan berasal dari partisipasi masyarakat, maka harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan transparan oleh masyarakat dan digunakan untuk memberi manfaat kepada masyarakat, sehingga setiap kebijakan pemerintah relevan dengan konteks kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Jadi pada prinsipnya kebijakan publik ini membatasi yang berkuasa dan melindungi rakyat yang lemah, sekaligus mewujudkan adanya ketegasan dalam akuntabilitas pemerintah.

Kebijakan (*policy*) sendiri menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan (Islamy, 1984:15) diartikan sebagai “suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek praktek yang terarah”(a *projected program of goals, values and practice*).

Carl D. Friedrick (Islamy, 1984 :17) mengartikan sebagai “serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan” (*a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilized and overcome in and effort to reach a goal or realize an objective or a purpose*). Berdasar uraian tersebut, kebijakan publik merupakan suatu ilmu multidisipliner yang melibatkan banyak disiplin ilmu, studi kebijakan ini berkembang pada awal 1970-an terutama melalui tulisan Harold D. Laswell. Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Howlett dan Ramesh (1995:2)

yang mendefinisikan kebijakan publik/*public policy* sebagai “suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu (*a projected of goals, values, and practices*)”. Sedangkan George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2008: 10) mendefinisikan kebijakan publik adalah “suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan”. Thomas R. Dye dalam Tilaar dan Nugroho (2008:185) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan “segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah”. Dengan demikian kebijakan publik pada intinya meliputi tujuan, nilai-nilai, dan praktik.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka kebijakan publik memiliki konsep-konsep sebagai berikut :

1. Kebijakan publik berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik/pelaksanaannya.
2. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta.
3. Kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah

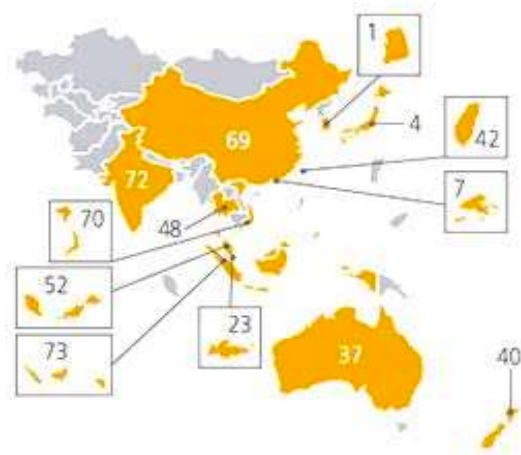
Dengan berbagai penjelasan di atas, maka suatu kebijaksanaan akan memuat 3 (tiga) elemen, meliputi :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

**Teori Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi atau “*implementation*”, berasal dari kata kerja “*to implement*”. Menurut Webster’s Dictionary (dalam Tachan, 2008: 29), *to implement* berasal dari bahasa Latin “*implementum*” dari asal kata “*impere*” dan “*plere*”. Kata “*impere*” dimaksudkan “*to fill up*”, “*to fill in*”, yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan “*plere*” maksudnya “*to fill*”, yaitu mengisi. Menurut Webster’s Dictionary (dalam Tachan, 2008: 29), “*to implement*” berarti: “(1) *to carry into effect; accomplish*. (2) *to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling; to give practical effect to*. (3) *to provide or equip with implements*” .

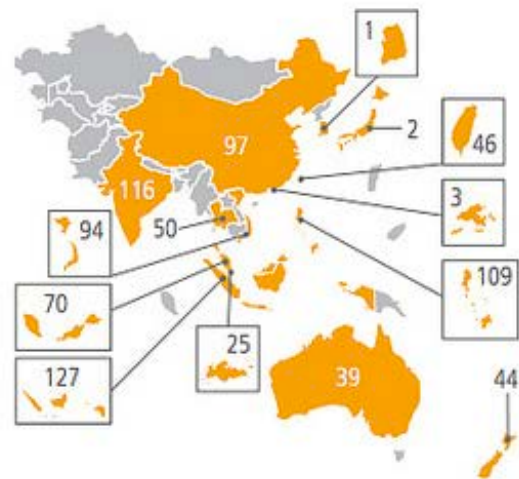
Global Rank	Country	% Above 4 Mbps	QoQ Change	YoY Change
1	South Korea	84%	-2.2%	28%
4	Japan	74%	2.4%	20%
7	Hong Kong	68%	-5.2%	-4.7%
23	Singapore	47%	-7.3%	-1.0%
37	Australia	38%	40%	31%
40	New Zealand	34%	-0.3%	2.5%
42	Taiwan	32%	-12%	-22%
48	Thailand	17%	-25%	-24%
52	Malaysia	12%	11%	83%
69	China	3.1%	3.0%	147%
70	Vietnam	3.0%	-19%	-47%
72	India	1.4%	17%	101%
73	Indonesia	0.8%	14%	-15%
-	Philippines	1.3%	2.2%	10%



Gambar 2 Broadband (>4 Mbps) Connectivity, Asia Pacific Countries (sumber : Akamai.com)



Global Rank	Country	Q2 '12 Avg. Mbps	QoQ Change	YoY Change
1	South Korea	14.2	-9.8%	2.9%
2	Japan	10.7	-1.6%	21%
3	Hong Kong	8.9	-4.1%	-14%
25	Singapore	5.1	-2.4%	12%
39	Australia	4.4	24%	25%
44	New Zealand	3.9	-0.3%	0.4%
46	Taiwan	3.7	-3.7%	-9.9%
50	Thailand	3.1	-5.5%	-1.1%
70	Malaysia	2.2	7.4%	17%
94	Vietnam	1.6	-1.0%	-15%
97	China	1.5	-0.5%	29%
109	Philippines	1.2	4.0%	1.7%
116	India	1.0	4.6%	21%
127	Indonesia	0.8	7.2%	20%



Gambar 3 Average Measured Connection Speed by Asia Pacific Country  
Pertumbuhan kecepatan koneksi internet rata-rata di negara-negara Asia Pasifik

Pertama, *to implement* dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, *to implement* dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu”. Ketiga, *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat”. Berdasar kata implementasi di atas, Pressman dan Wildavsky (dalam Tachan, 2008: 29) mengemukakan bahwa, *implementation as to carry out, accomplish fulfill produce, complete*”. Dimaksudkan : membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Sehingga secara etimologis implementasi dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Bila pengertian implementasi di atas dirangkai dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Jadi implementasi kebijakan publik merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Anderson (dalam Tachan, 2008: 30) mengemukakan bahwa: “*policy implementation is the application of the policy by the government’s administrative machinery to the problem*”. Kemudian Edward III (dalam Tachan, 2008: 30) mengemukakan bahwa: “*Policy implementation, ...is the stage of policy making between the establishment of a policy...and the consequences of the policy for the people whom it affects*”. Sedangkan Grindle (dalam Tachan, 2008: 30) mengemukakan bahwa: “*implementation – a general process of administrative action that can be investigated at specific program level*”.

Dengan pengertian tersebut dapat memberi gambaran bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Artinya kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian “Strategi Implementasi Kebijakan Publik Dalam Mendorong Percepatan Pengembangan Pengguna Internet” ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dan dengan menggunakan analisis kebijakan publik. Karena kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat, maka diperlukan juga keterlibatan data dan informasi dari masyarakat yang juga diperlukan sebagai input data eksternal.

Issue kebijakan (*policy issues*) atau masalah kebijakan (*policy problem*) bila terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut.

#### B. Teknik Penelitian

Teknik penelitian dilakukan dengan melakukan survei lapangan untuk mendapatkan input dari lingkungan intern dan ekstern, dalam hal ini dari pihak dinas yang menangani internet dan pihak pengguna internet di lapangan serta data sekunder yang berkaitan dengan studi ini.

#### C. Populasi Dan Sampel

Disamping data informasi dari pemerintah daerah yang menangani internet yaitu ke 4 lokasi Dinas yang menangani Komunikasi dan Informatika, dilakukan juga survey kepada masyarakat pengguna internet sebagai responden sebagai input data eksternal. Jumlah responden untuk mendapatkan data ekstern di lapangan meliputi 100 responden. Sampel diambil secara judgment sampling, salah satu jenis purposive sampling. Pemilihan kepada judgment sampling ini karena pemilihan sampel berdasarkan penilaian terhadap beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud penelitian.

**D. Lokasi Penelitian**

Pemilihan lokasi survei ditentukan dengan alasan bahwa lokasi tersebut memiliki pengguna internet yang potensial dan diperkirakan cepat perkembangannya, didukung sebagai kota-kota budaya dan wisata, sekaligus mewakili wilayah timur, barat dan tengah dalam sentral pengembangan internet.

Lokasi penelitian ini meliputi kota-kota di wilayah Jakarta, Yogyakarta, Padang dan Denpasar.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

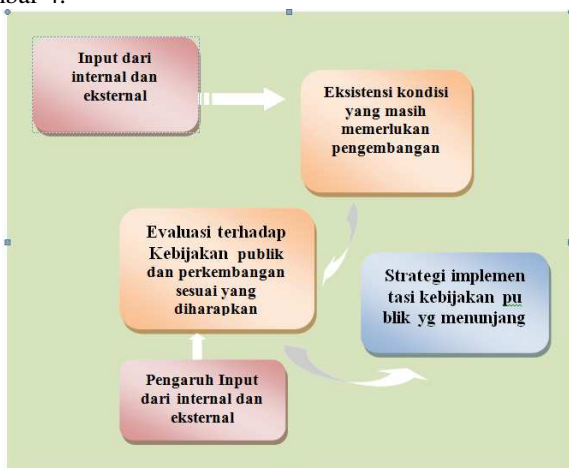
Teknik pengumpulan data responden intern 4 lokasi dan kepada 100 responden ekstern menggunakan kuesioner sehingga dapat menggambarkan kondisi yang berkembang dalam masyarakat terkait dengan penggunaan dan kepuasan masyarakat terhadap fasilitas layanan internet.

**F. Teknik Analisis**

Di dalam analisis data intern terkait dengan kebijakan publik, menggunakan metodologi model Easton.

Kebijakan publik bermula dari adanya input berupa masukan yang berasal dari lingkungan baik intern maupun ekstern. Kemudian masukan yang berupa tuntutan dan dukungan tersebut berjalan hingga masuk kedalam agenda pemerintahan sehingga akhirnya keluar sebagai output yang berupa kebijakan dan diumpunbalikkan kembali kepada lingkungan.

Alur pikir analisis kebijakan publik diperlihatkan pada Gambar 4.



Gambar 4 Alur pikir analisis kebijakan publik

**IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kebijakan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.

Semua hasil kebijakan publik diharapkan dapat memuaskan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders), namun ada beberapa hal yang mungkin menjadikan beberapa pihak tidak puas dengan kebijakan publik yang dikeluarkan. Oleh karena itu perlu evaluasi yang dapat mendukung strategi pengembangan internet dengan kebijakan publik yang menunjang.

Dalam bab ini, akan dianalisis pada masing masing sub dalam alur pikir yang diuraikan sebelumnya, sehingga secara konsisten dapat diberikan suatu kesimpulan dan saran yang terkait langsung dengan peran kebijakan publik dalam percepatan pengguna internet.

Sebagaimana dinyatakan dalam bab terdahulu bahwa kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986 diantaranya:

1. Telah mencapai titik kritis tertentu yang jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius;
2. Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu;
3. Berdampak dramatis jika tidak dilakukan pemunculan kebijakan oleh pejabat berwenang;
4. Menjangkau dampak yang amat luas ;
5. Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat ;
6. Menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya).

Hasil pengumpulan data diuraikan dalam data internal dan data eksternal.

**A. Data internal**

Data terkait dengan Kebijakan Publik di Daerah dari hasil pengumpulan data yaitu meliputi :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Denpasar
2. Layanan Teknologi dan Manajemen Informasi DI Yogyakarta
3. Dinas Perhubungan dan Kominfo Sumatera Barat
4. Dinas Kominfo dan Kehumasan DKI Jakarta

**B. Data eksternal**

Untuk kepentingan dan kepuasan pengguna layanan internet atas Kebijakan Publik yang berlaku saat ini, dapat diuraikan posisi dan kondisinya sebagai berikut. Data dari responden yang diperoleh di lapangan menggambarkan karakteristik yang berbeda untuk masing masing daerah. Karakteristik meliputi:

1. Perangkat (*hard ware*) milik sendiri, sewa, kantor, kampus/ sekolah.
2. Waktu yang diperlukan untuk *loading time* awal internet komputer/ laptop/ipad
3. *Website* yang paling digemari : berita, pengetahuan, business online, game/ permainan, lainnya
4. Lama menggunakan internet : 1-3 jam, 4-6 jam, 7-10 jam, lebih dari 10 jam

**C. Data input internal**

Data dan informasi masukan baik dari lingkungan internal maupun eksternal sebagai bahan awal mengembangkan teknis analisis.

Dalam menganalisis data dan informasi dari lingkungan internal, tinjauan diarahkan pada penyelenggara/ dinas di daerah yang menangani internet.

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Denpasar  
 Pada pengembangan IT, Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Denpasar masih belum menunjukkan action plan yang mengarah pada perkembangan internet, kebijakan dalam program kegiatan

masih seperti kegiatan yang rutin sebagaimana tahun sebelumnya dilakukan.

Termasuk juga dalam kinerja organisasi yang ada, belum dilakukan evaluasi sehingga struktur organisasi yang dibentuk masih belum menyesuaikan dengan perkembangan ICT Pusat, sehingga dalam beberapa hal masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya, cenderung pelaksanaan yang hanya mengikuti program, cenderung statis, kurang kreatif dan inovatif.

## 2. Layanan Teknologi dan Manajemen Informasi DI Yogyakarta.

Layanan Teknologi dan Manajemen Informasi (LTMI) di Yogyakarta telah tanggap terhadap pengembangan IT dengan menunjukkan berbagai kegiatan yang mengarah pada perkembangan internet, kebijakan dalam program kegiatan seperti : Kemitraan yang dilakukan untuk menunjukkan keberhasilan dalam membangun dan mengembangkan budaya berinternet bekerjasama dengan 4 pilar pengembangan e-government di DIY, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat dalam mewujudkan “*Yogya Cyber Province*”.

Disamping itu juga dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, masyarakat LSM, masyarakat bergerak di bidang IT untuk menyusun program e-literasi, disesuaikan dengan SKPD yang ada. SDM yang menjadi staf bidang LTMI cukup potensial dalam menangani berbagai hal terkait dengan komunikasi dan informatika.

Kemajuan lainnya adalah bahwa Yogyakarta Internet Exchange yang dibangun telah memotivasi dalam bentuk:

- a. Jaringan internet yang relatif lebih murah;
- b. Merupakan jalur alternative bagi sebuah PJI apabila jalur koneksi ke internet.
- c. Lebar pita (*bandwidth*) yang tinggi antar PJI Indonesia akan memberikan insentif bagi penyedia informasi (*content provider*) menempatkan basis datanya di Indonesia, baik bagi penyedia informasi lokal maupun internasional.
- d. Interkoneksi lokal dan nasional dimanfaatkan untuk layanan-layanan baru yang membutuhkan lebar pita yang tinggi.
- e. Dicanangkannya Jogja sebagai *Cyber Province*.

LTMI dipandang cukup kreatif dan inovatif, meskipun dalam berbagai kegiatan Kementerian Kominfo maupun USO tidak pernah melibatkan LTMI.

## 3. Dinas Perhubungan dan Kominfo Sumatera Barat *Information, Communication, and Technology* (ICT) untuk *e-Government* telah merubah mekanisme pelayanan publik.

Bidang Kominfo masih tergabung di bawah Dinas Perhubungan dan Kominfo Sumatera Barat. Data yang mengenai visi dan misi sebaiknya diperjelas di dalam webnya Dinas Perhubungan dan Kominfo Sumatera Barat. Struktur organisasi yang menangani komunikasi informatika belum disesuaikan dengan perkembangan multi media dan era internet pada saat ini.

Kegiatan sosialisasi ataupun workshop merupakan kegiatan prioritas di Dinas Hubkominfo. Masih banyak hal yang belum ditangani Dinas

Perhubungan dan Kominfo Sumatera Barat berkaitan dengan kebijakan publik dalam pembangunan internet

dalam meraih pangsa pengguna internet yang menjangkau 50% jumlah penduduk pada tahun 2015.

Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan ICT untuk e-Government Sumbar, diarahkan untuk meningkatkan kinerja bagian Komunikasi dan Informatika.

Kebijakan Pelatihan Teknologi Informasi (TI) Pemerintahan Kota Padang diarahkan untuk dimanfaatkan dalam mengakses dan memberikan informasi kepada publik atau dimanfaatkan menyimpan data tertentu.

## 4. Dinas Kominfo dan Kehumasan DKI Jakarta

Aktivitas Dinas Kominfo dan Kehumasan dari DKI Jakarta tertata sesuai dengan perkembangan teknologi informasi mengindikasikan kesiapan dalam menghadapi perkembangan TIK yang semakin pesat. Kegiatan dimaksud terkait dengan good governance, SMS Center, *Sistem Informasi Aset Berbasis Web.*, Perawatan Modem Router Jaringan Telepon, Pembangunan Trunking Kepulauan Seribu, sosialisasi fasilitasi pos dan telekomunikasi serta informasi dan lain lain.

Permasalahan Dinas Kominfo dan Kehumasan DKI Jakarta dalam layanan internet adalah adanya beberapa warnet yang belum berijin (illegal) belum didukung dengan regulasi yang membuat hilangnya ISP illegal. Beberapa pengusaha jasa internet menilai terkait dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, bahwa sosialisasi tentang internet yang diberikan pemerintah masih kurang. Kebijakan publik diarahkan untuk memajukan internet adalah dengan meningkatkan dan menambah sarana prasarana TIK seperti Hotspot, wifi dan jaringan internet ke masyarakat.

### D. Data input eksternal

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan data dan informasi dari masyarakat diperlukan sebagai input dari eksternal.

Adanya *issue* kebijakan (*policy issues*) atau masalah kebijakan (*policy problem*) mungkin karena telah terjadi silang pendapat di antara para pemangku kepentingan (*stakeholders*) mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan, yaitu dalam layanan jasa internet.

1. peningkatan infrastruktur yang dapat menunjang kelancaran berinternet.
2. Kondisi pengguna internet yang memanfaatkan konten paling sering dikunjungi. Pilihan website yang paling digemari : berita, pengetahuan, business online, game/permainan, lainnya. Secara umum masih mengarah ke permainan (29%), kecuali yang di Jakarta sudah lebih cenderung ke pengetahuan.
3. lama menggunakan internet : 1-3 jam, 4-6 jam, 7-10 jam, lebih dari 10 jam. Penggunaan internet yang lama sampai 3 jam maupun sampai yang lebih dari 10 jam semua memang ada kepentingan sesuai kebutuhan pengguna internet, tetapi data ini telah menunjukkan bahwa berinternet sudah merupakan suatu kebutuhan untuk kegiatan yang berkaitan dengan tugas pendidikan, pekerjaan, bisnis dan lain lain.
4. peningkatan infrastruktur yang dapat menunjang kelancaran berinternet.

5. Kondisi pengguna internet yang memanfaatkan konten paling sering dikunjungi. Pilihan website yang paling digemari : berita, pengetahuan, business online, game/ permainan, lainnya. Secara umum masih mengarah ke permainan (29%), kecuali yang di Jakarta sudah lebih cenderung ke pengetahuan
6. Lama menggunakan internet : 1-3 jam, 4-6 jam, 7-10 jam, lebih dari 10 jam. Penggunaan internet yang lama sampai 3 jam maupun sampai yang lebih dari 10 jam semua memang ada kepentingan sesuai kebutuhan pengguna internet, tetapi data ini telah menunjukkan bahwa berinternet sudah merupakan suatu kebutuhan untuk kegiatan yang berkaitan dengan tugas pendidikan, pekerjaan, bisnis dan lain lain.

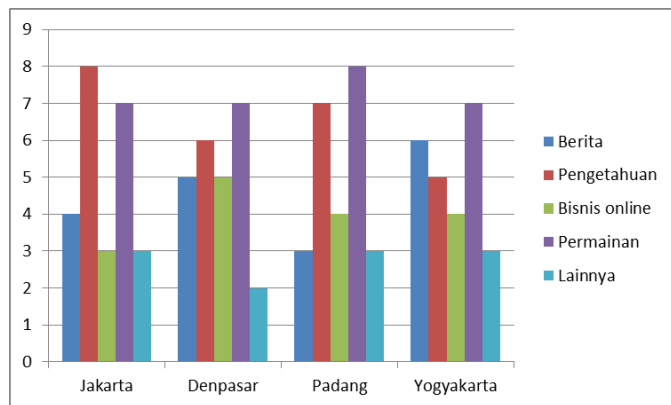
Tabel 2 menyajikan data mengenai jawaban responden tentang jenis konten yang paling sering diakses melalui internet.

TABEL 2 KONTEN YANG PALING SERING DIKUNJUNGI DALAM INTERNET

Jenis Konten	Jakarta	Denpasar	Padang	Yogyakarta	%
Berita	4	5	3	6	18
Pengetahuan	8	6	7	5	26
Bisnis online	3	5	4	4	16
Permainan	7	7	8	7	29
Lainnya	3	2	3	3	11

Sumber : data diolah

Dalam bentuk Grafik, jawaban responden mengenai jenis konten yang paling sering diakses diperlihatkan pada Gambar 5.



Gambar 5 Grafik Konten yang paling sering dikunjungi dalam internet (sumber : data diolah)

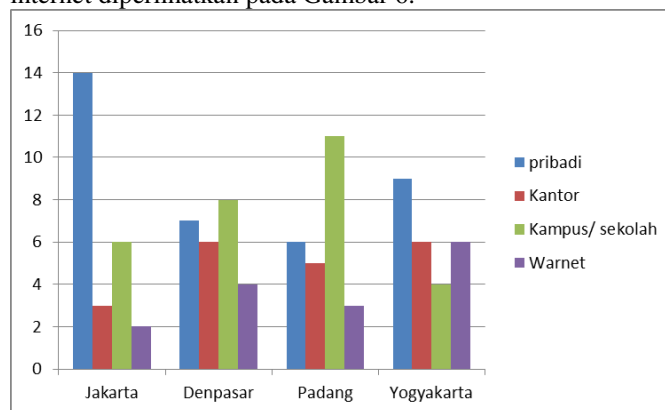
Tabel 3 menyajikan data mengenai jawaban responden tentang kepemilikan perangkat yang digunakan untuk mengakses internet.

TABEL 3 KEPEMILIKAN PERANGKAT UNTUK MENGAKSES INTERNET

Kepemilikan perangkat	Jakarta	Denpasar	Padang	Yogyakarta	%
pribadi	14	7	6	9	36%
Kantor	3	6	5	6	20%
Kampus/ sekolah	6	8	11	4	29%
Warnet	2	4	3	6	15%

Sumber : data diolah

Dalam bentuk grafik, jawaban responden mengenai kepemilikan perangkat yang digunakan untuk mengakses internet diperlihatkan pada Gambar 6.



Gambar 6 Grafik Kepemilikan Perangkat untuk Mengakses internet (sumber : data diolah)

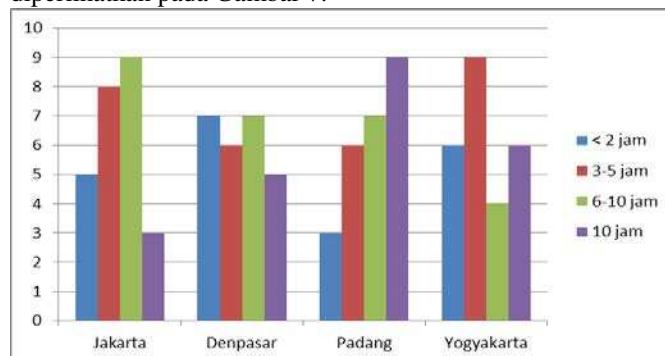
Tabel 4 menyajikan data jawaban responden tentang waktu rata-rata yang digunakan untuk mengakses internet dalam sehari.

TABEL 4 WAKTU RATA-RATA UNTUK MENGAKSES INTERNET PER HARI

Lama berinternet	Jakarta	Denpasar	Padang	Yogyakarta	%
< 2 jam	5	7	3	6	21%
3-5 jam	8	6	6	9	29%
6-10 jam	9	7	7	4	27%
10 jam	3	5	9	6	33%

Sumber : data diolah

Dalam bentuk grafik, jawaban responden tentang waktu rata-rata yang digunakan untuk mengakses internet per hari diperlihatkan pada Gambar 7.



Gambar 7 Grafik Waktu rata-rata untuk Mengakses Internet per Hari (sumber : data diolah)

Tabel 5 menyajikan data jawaban responden mengenai kecepatan dari jaringan yang digunakan untuk mengakses internet.

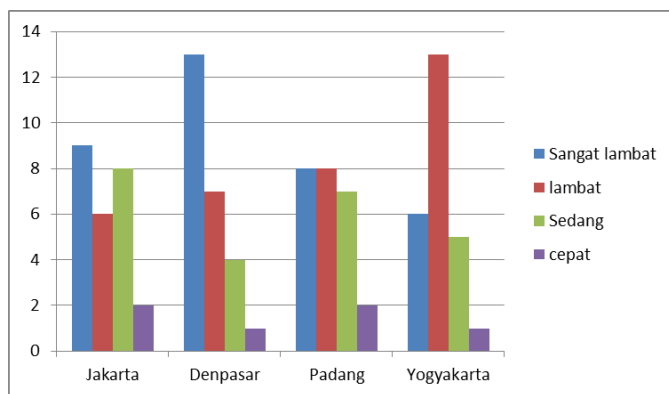
TABEL 5 KECEPATAN AKSES INTERNET

Kecepatan akses	Jakarta	Denpasar	Padang	Yogyakarta	%
Sangat lambat	9	13	8	6	36%
lambat	6	7	8	13	34%
Sedang	8	4	7	5	24%
cepat	2	1	2	1	6%

Sumber : data diolah



Dalam bentuk grafik, jawaban responden mengenai kecepatan akses internet diperlihatkan pada Gambar 8.



Gambar 8 Grafik kecepatan akses internet yang digunakan (sumber : data diolah)

Kebijakan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, juga telah diterapkan pada pemerintahan dalam hal ini terkait dengan pengembangan internet di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Infrastruktur telekomunikasi antara lain terdiri dari jaringan telekomunikasi, menara, infrastruktur perkantoran misalnya komputer, printer, facsimile dan telepon; infrastruktur penunjang kerja seperti alat monitoring spektrum frekuensi serta infrastruktur penunjang seperti kabel LAN atau Hub. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat yang menuntut kesesuaian peralatan yang mutakhir telah menjadikan kondisi yang dihadapi UPT di lingkungan Depkominfo adalah belum terpenuhinya kualitas infrastruktur telekomunikasi di UPT (Abdulaziz).

Dalam bab ini, akan dianalisis pada masing masing sub dalam alur pikir seperti yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga secara konsisten dapat diberikan suatu kesimpulan dan saran yang terkait langsung dengan peran kebijakan publik dalam percepatan pengguna internet.

Sebagaimana dinyatakan dalam bab terdahulu bahwa kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986) diantaranya:

1. Telah mencapai titik kritis tertentu yang jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius;
2. Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu;
3. Terdampak dramatis jika tidak dilakukan pemunculan kebijakan oleh pejabat berwenang;
4. Tenjangkau dampak yang amat luas ;
5. Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat ;
6. Menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya).

#### E. Analisis input internal

Data dan informasi masukan baik dari lingkungan internal maupun eksternal merupakan bahan awal untuk mengembangkan teknis analisis. Dalam menganalisis data dan informasi dari lingkungan internal, tinjauan juga diarahkan pada penyelenggara/ dinas di daerah yang menangani internet.

#### 1. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Denpasar

Pada pengembangan IT, Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Denpasar masih belum menunjukkan *action plan* yang mengarah pada perkembangan internet, kebijakan dalam program kegiatan masih seperti kegiatan yang rutin sebagaimana tahun sebelumnya dilakukan.

Termasuk juga dalam kinerja organisasi yang ada, belum dilakukan evaluasi sehingga struktur organisasi yang dibentuk masih belum menyesuaikan dengan perkembangan ICT Pusat, sehingga dalam beberapa hal masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya, cenderung pelaksanaan yang hanya mengikuti program, cenderung statis, kurang kreatif dan inovatif.

#### 2. Layanan Teknologi dan Manajemen Informasi DI Yogyakarta.

Layanan Teknologi dan Manajemen Informasi (LTMI) di Yogyakarta telah tanggap terhadap pengembangan IT dengan menunjukkan berbagai kegiatan yang mengarah pada perkembangan internet, kebijakan dalam program kegiatan seperti : Kemitraan yang dilakukan untuk menunjukkan keberhasilan dalam membangun dan mengembangkan budaya berinternet bekerjasama dengan 4 pilar pengembangan e-government di DIY, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat dalam mewujudkan "*Yogya Cyber Province*".

Disamping itu juga dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, masyarakat LSM, masyarakat bergerak di bidang IT untuk menyusun program e-literasi, disesuaikan dengan SKPD yang ada. SDM yang menjadi staf bidang LTMI cukup potensial dalam menangani berbagai hal terkait dengan komunikasi dan informatika.

Kemajuan lainnya adalah bahwa Yogyakarta Internet Exchange yang dibangun telah memotivasi dalam bentuk :

- a. Jaringan internet yang relatif lebih murah;
- b. Merupakan jalur alternative bagi sebuah PJI apabila jalur koneksi ke internet.
- c. Lebar pita (*bandwidth*) yang tinggi antar PJI Indonesia akan memberikan insentif bagi penyedia informasi (*content provider*) menempatkan asis datanya di Indonesia, baik bagi penyedia informasi lokal maupun internasional.
- d. Interkoneksi lokal dan nasional dimanfaatkan untuk layanan-layanan baru yang membutuhkan lebar pita yang tinggi.
- e. Dicanangkannya Jogja sebagai *Cyber Province*.

LTMI dipandang cukup kreatif dan inovatif, meskipun dalam berbagai kegiatan Kementerian Kominfo maupun USO tidak pernah melibatkan LTMI.

#### 3. Dinas Perhubungan dan Kominfo Sumatera Barat *Information, Communication, and Technology* (ICT) untuk *e-Government* telah merubah mekanisme pelayanan publik.

Bidang Kominfo masih tergabung di bawah Dinas Perhubungan dan Kominfo Sumatera Barat. Data yang mengenai visi dan misi sebaiknya diperjelas di dalam web-nya Dinas Perhubungan dan Kominfo Sumatera Barat.

Struktur organisasi yang menangani komunikasi informatika belum disesuaikan dengan perkembangan multi media dan era internet pada saat ini.

Kegiatan sosialisasi ataupun *workshop* merupakan kegiatan prioritas di Dinas Hubkominfo. Masih banyak hal yang belum ditangani Dinas Perhubungan dan Kominfo Sumatera Barat berkaitan dengan kebijakan publik dalam pembangunan internet dalam meraih pangsa pengguna internet yang menjangkau 50% jumlah penduduk pada tahun 2015.

Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan ICT untuk e-Government Sumbar, diarahkan untuk meningkatkan kinerja bagian Komunikasi dan Informatika.

Kebijakan Pelatihan Teknologi Informasi (TI) Pemerintahan Kota Padang diarahkan untuk dimanfaatkan dalam mengakses dan memberikan informasi kepada publik atau dimanfaatkan menyimpan data tertentu.

#### 4. Dinas Kominfo dan Kehumasan DKI Jakarta

Aktivitas Dinas Kominfo dan Kehumasan dari DKI Jakarta tertata sesuai dengan perkembangan teknologi informasi mengindikasikan kesiapan dalam menghadapi perkembangan TIK yang semakin pesat. Kegiatan dimaksud terkait dengan good governance, SMS Center, Sistem Informasi Aset Berbasis Web., Perawatan Modem Router Jaringan Telepon, Pembangunan Trunking Kepulauan Seribu, sosialisasi fasilitasi pos dan telekomunikasi serta informasi dan lain lain.

Permasalahan Dinas Kominfo dan Kehumasan DKI Jakarta dalam layanan internet adalah adanya beberapa warnet yang belum berijin (*illegal*) belum didukung dengan regulasi yang membuat hilangnya ISP illegal. Beberapa pengusaha jasa internet menilai terkait dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, bahwa sosialisasi tentang internet yang diberikan pemerintah masih kurang. Kebijakan publik diarahkan untuk memajukan internet adalah dengan meningkatkan dan menambah sarana prasarana TIK seperti Hotspot, wifi dan jaringan internet ke masyarakat.

### V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Perkembangan yang terjadi dalam menunjukkan peran masing masing pemangku kepentingan dengan membahasnya dalam analisis terkait dengan kebijakan publik, maka dapat diuraikan dalam simpulan dan memberikan saran untuk mencapai kemajuan/ peningkatan pengguna internet hingga mencapai target sesuai yang diharapkan.

#### G. Kesimpulan

1. Pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan program program pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja di bidang internet masih memerlukan pengembangan lebih lanjut karena data dan pemeringkatan pengguna internet baru mencapai peringkat bawah, masih baru mencapai kurang dari seperempat dari penetrasi dari populasi, sehingga perlu langkah lanjut pembangunan ke depan agar pengguna internet semakin berkembang lagi. Meskipun sosialisasi terus dijalankan, harapan ini sangat didambakan oleh masyarakat karena telah disadari bahwa penggunaan internetlah yang lebih banyak akan memberi andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus kesejahteraan masyarakat. Kemudian, implementasi

kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ditetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Jadi implementasi kebijakan publik merupakan tahapan yang bersifat praktis untuk meraih sukses pengembangan layanan internet yang terus dilakukan pemerintah untuk membangun peningkatan jumlah pengguna internet.

2. Peran pemerintah bersama para *stakeholders* bidang internet dalam kerangka yang terkoordinasi dapat mewujudkan pemerataan pembangunan jaringan internet yang terjangkau oleh seluruh warga masyarakat dan optimisme meningkatnya pengguna internet diharapkan dapat mempercepat peningkatan jumlah pengguna internet, melalui langkah langkah yang telah ditetapkan agenda setting, pernyataan kebijakan (*policy statement*) yang berupa peraturan perundangan dan aksi kebijakan (*policy action*) serta evaluasi implementasi kebijakan dengan memperhatikan tingkat kinerja dan dampak dari implementasi kebijakan. Uraian tersebut kemudian diwujudkan dalam analisis dalam bentuk informasi kinerja yang akan menjadi dasar tindakan apakah kebijakan tersebut akan diteruskan, disempurnakan lagi atau bahkan mungkin tidak dilakukan atau ditarik kembali.
3. Masih lemahnya peran beberapa dinas kominfo di daerah dalam menyusun program pengembangan internet dan struktur organisasi yang belum menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, menjadikan pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan kualitas masyarakat dalam bidang kemampuan berinternet belum optimal. Program dan kegiatan yang dilaksanakan masih cenderung sama dengan kegiatan pada tahun tahun sebelumnya;
4. Arah implementasi kebijakan publik menunjukkan belum terwujudnya koordinasi yang mantap antara instansi di bawah Kementerian Kominfo (kantor pusat) dengan dinas Kominfo di daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam upaya memasyarakatkan dan memacu pengembangan pengguna internet. Hal demikian menjadikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di daerah lebih bersifat kegiatan yang dilaksanakan berdasar program pemerintah pusat yang kurang diaplikasikan dan diterapkan apalagi dikembangkan dan dapat mengena untuk membangun kemampuan masyarakat di daerah

#### H. Rekomendasi

1. Implementasi kebijakan public diarahkan kepada yang lebih fokus dalam penanganan pembangunan internet yang terstruktur dalam mewujudkan kesiapan pemberi layanan internet – *internet service provider* yang legal dengan lebih mengarahkan kepada layanan internet yang lebih memberi kepuasan kepada pengguna internet. Evaluasi dan

pemantapan struktur organisasi dinas di daerah yang menangani komunikasi dan informatika untuk lebih efektif dalam mensosialisasikan bidang internet, disamping koordinasi yang dilakukan pemerintah pusat (Kementerian Kominfo) dalam setiap kegiatan di daerah, sehingga setiap kegiatan di daerah dapat ditindaklanjuti melalui inovasi yang mewujudkan efektivitas pengembangan masyarakat dalam pembangunan teknologi informasi dan khususnya di bidang pengembangan internet.

2. Pemerintah perlu mempersiapkan lebih nyata kebijakan public untuk diimplementasikan sehingga membentuk pemerintah daerah utamanya dinas komunikasi dan informatika yang lebih tanggap dalam pembangunan internet dan melakukan pembinaan yang berdampak pada semakin cepatnya pembangunan internet yang disiapkan sesuai kehendak masyarakat pengguna internet, terutama pada ketersediaan infrastruktur maupun perangkat operasionalnya.
3. Untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi akibat semakin pesatnya pertumbuhan internet, diharapkan peran para *stakeholders* yang sinergi memiliki peran dalam kemajuan penggunaan internet. Dalam hal ini diperlukan toleransi antar *stakeholders* yang dapat mewujudkan iklim keterbukaan, ditambah dukungan atas kreativitas dalam membangun perluasan jangkauan internet.
4. Dalam upaya pembangunan layanan internet yang berkelanjutan, Pemerintah masih harus memantapkan regulasi bidang internet untuk mengatasi pelanggaran yang dikukuhkan dalam aturan perundang undangan. Pertimbangan ini untuk mengantisipasi bila tidak didukung dengan ketegasan dalam peraturan perundang undangan, dikhawatirkan akan semakin menyebar luasnya penyimpangan, disamping dampaknya juga kerugian bagi pemerintah. Karenanya Pemerintah perlu mengevaluasi implementasi kebijakan publik yang telah diterapkan untuk

dilakukan kaji ulang disesuaikan dengan perkembangan internet yang terjadi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulaziz, H. “*Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional*” e-Gov Depkominfo;
- Mariyati, T (2008). *Strategi Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Daerah*, Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol 6. No. 4 Desember 2008
- Mariyati, T (2008). *Strategi Pemberdayaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Pemberdayaan SDM dalam Mendukung Perkembangan TIK*, Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol.6 No.3 September 2008
- Mariyati, T (2009). *Strategi Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi –TIK serta Pengaruhnya Terhadap pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing*, Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 7 No.2 Juni 2009
- Mariyati, T (2009). *Pembangunan Desa Dengan Memanfaatkan Strategi Pemerataan Akses Internet Dan Penyebaran Informasi*, Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol.7 No.3 September 2009
- Mariyati, T (2009). “*Efek Pertumbuhan Ekonomi Dalam Proses Pengembangan Telekomunikasi Perdesaan*” Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 7 Nomer 1 Maret 2009
- Oetomo, B.S.D ( 2002). *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Puslitbang SDPPI (2012). *Optimalisasi Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia*, Jakarta : Badan Litbang SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Suhrowardi, S (2006) *Kajian Teknologi Informasi Komunikasi “Mewujudkan Akses Internet Yang Murah:Tantangan Kebijakan atau Keterbatasan Teknis ?”* Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Ustadiyanto R (2002). *Framework e-Commerce*. Yogyakarta : Andi Offset
- Bisnis Indonesia (2012). *Indonesia Capai 62,9 juta Pengguna Internet*. Ed. 2 November 2012

